

**RESPONS SALAFI TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DAN DOKTRIN KETAATAN KEPADA PEMERINTAH**



**Oleh:
Muhammad Mufti Al Achsan
NIM: 19200013010**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam**

**Yogyakarta
2021**

ABSTRAK

Penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia telah memunculkan beragam respons dari masyarakat. Dari beragam respons yang ada, respons negatif lebih banyak muncul dari kalangan Muslim konservatif, yakni berupa penilaian buruk atas kinerja pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Dalam studi yang ada, penjelasan atas fenomena ini adalah sebab adanya polarisasi agama di masa pemilu yang berdampak pada bagaimana mereka bersikap. Kelompok Muslim konservatif yang di masa itu menjadi oposisi Jokowi cenderung memberikan respons negatif terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani wabah.

Berangkat dari studi tersebut, studi ini mencoba melihat bagaimana respons Salafi, sebagai salah satu varian Muslim konservatif, dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Studi ini berfokus pada Salafi *purist*, yang dikenal memegang teguh doktrin ketaatan kepada pemerintah sekaligus bersikap apolitis. Dengan berbasis pada data *online* dan lapangan melalui studi kasus di masjid dan pesantren Salafi, studi ini hendak menjawab beberapa pertanyaan: (a) bagaimana Salafi merespons kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19? (b) apakah respons tersebut berkaitan dengan polarisasi agama di masa pemilu? (c) sejauh mana doktrin ketaatan kepada pemerintah menentukan respons tersebut?

Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa meski Salafi ikut larut dalam polarisasi agama di masa pemilu, hal itu tidak menjadi landasan penentu sikap mereka dalam merespons kebijakan pemerintah di masa pandemi. Beberapa aspek seperti prinsip ketaatan pada pemerintah, kekhawatiran akan bahaya Covid-19, ketundukan pada tekstualitas dalil, dan konteks sosio-politik yang ada menjadi pertimbangan Salafi dalam mengambil sikap atas imbauan dan kebijakan pemerintah. Paradoksnya, dalam praktiknya bukan lantaran doktrin ketaatan maupun aspek lainnya tersebut yang menjadikan mereka patuh terhadap imbauan dan kebijakan. Dalam kasus masjid dan pesantren, sikap para tokoh Salafi atas kebijakan yang ada cenderung lebih menentukan bagaimana para jemaah kemudian ikut bersikap dan menerapkan protokol kesehatan. Keputusan jemaah Salafi untuk menerima vaksin lebih didasari oleh legitimasi MUI dan narasi dari para tokoh Salafi yang berprofesi sebagai dokter.

Kata Kunci: Covid-19, Polarisasi Agama, Respons Salafi, Doktrin Ketaatan pada Pemimpin

ABSTRACT

The handling of the Covid-19 pandemic by the Indonesian government has generated various responses from the public. Of the various responses, there are more negative responses that emerged from conservative Muslims. They do not comply with the established policies and assess that the government's performances are poor. Previous studies had revealed that it occurred due to religious polarization during the election period which impacts how they behave. Conservative Muslim groups, who at that time became Jokowi's opposition, tended to give a negative response to the government's policies in dealing with the outbreak.

Departing from those studies, this study tries to see how the Salafis, as a variant of conservative Muslims, respond to government policies. This study focuses on Purist Salafis who are known to uphold the doctrine of obedience to the ruler and are known as apolitical as well. This study aims to answer several questions based on online and field data through case studies in Salafi boarding schools and mosques: (a) how do Salafis respond to the government's policies in dealing with the Covid-19 outbreak? (b) are those responses related to religious polarization during the election? (c) to what extent does the doctrine of obedience to the ruler determine the responses?

This study shows that although Salafis were involved in religious polarization during the previous election period, it did not determine their attitude in responding to the government's policies during the pandemic. Several aspects such as the principle of obedience to the ruler, awareness about the danger of Covid-19, submission to the Islamic doctrine and the socio-political context, are taken into consideration by Salafis in taking a stand on government calls and policies. Paradoxically, in practice, it is not because of the doctrine of obedience or those other aspects that make them comply with the calls and policies. In the case of mosques and Islamic boarding schools, the attitude of Salafi leaders to existing policies tends to determine how the congregation participates in acting and implementing health protocols then. The decision of the Salafi congregation to receive the Covid-19 vaccine is based on the legitimacy of the MUI and the narratives of Salafi leaders who also work as doctors.

Keywords: Covid-19, Religious Polarization, Salafis Responses, Obedience to the Ruler Principle

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mufti Al Achsan, S.Ag.
NIM : 19200013010
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Mufti Al Achsan, S.Ag.
NIM: 19200013010

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mufti Al Achsan, S.Ag.
NIM : 19200013010
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Mufti Al Achsan, S.Ag.
NIM: 19200013010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**RESPONS SALAFI TERHADAP PENANGANAN COVID-19
DAN DOKTRIN KETAATAN KEPADA PEMERINTAH**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Mufti Al Achsan, S.Ag.
NIM : 19200013010
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 21 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DPPs/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : RESPONS SALAFI TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DAN DOKTRIN KETAATAN KEPADA PEMERINTAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUFTI AL ACHSAN, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 19200013010
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 613de33bca303



Penguji II

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 613de31c0d69c



Penguji III

Dr. Moh. Mufid

SIGNED

Valid ID: 613de30d3e1c5



Yogyakarta, 16 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 613de607028ea

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mî'Im	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

فعل		ditulis	fa'ala
ك	kasrah	Ditulis	I
ذكر		ditulis	Žukira
د	Dammah	Ditulis	U
يذهب		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala karunia dan kasih sayang-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini, meski dalam waktu yang terlampau terlambat dari *deadline* yang ditetapkan pihak Pascasarjana. Dengan segala keterbatasan saya dan berbagai kendala yang menimpa dalam penyelesaian tugas akhir ini saya telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, di bagian pengantar ini, adalah sebuah keharusan bagi saya untuk mengucapkan seuntai kata terima kasih dan permohonan maaf kepada mereka.

Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sunarwoto, yang telah berperan besar membimbing saya dalam penyelesaian studi ini dengan memberikan berbagai ide, kritik, saran, nasihat, masukan, dan bermacam bantuan lainnya kepada saya. Meski terkadang kritik yang diberikan agak keras dan menyakitkan, tapi saya meyakini bahwa itu adalah bentuk kepedulian beliau kepada saya. Integritas dan idealisme beliau adalah inspirasi bagi saya. Saya merasa beruntung telah dibimbing beliau, namun saya juga menyesal karena kesempatan tersebut tidak saya gunakan secara maksimal dalam menyelesaikan studi ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya tujukan kepada pihak Kementerian Agama sebagai penyelenggara beasiswa PMLD (Program Magister Lanjut Doktor). Tanpa inisiatif dan pendanaan yang mereka berikan kiranya saya tidak dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang Magister ini. Pihak kampus UIN Sunan Kalijaga, terutama Program Interdisciplinary Islamic Studies yang telah membantu dan memfasilitasi studi saya tidak lupa saya sampaikan banyak terima kasih. Para dosen yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman akademik khususnya tentang cara meneliti dan menulis karya ilmiah: Bapak Noorhaidi Hasan, Bapak Moch. Noor Ichwan, Bapak Ahmad Rafiq, Bapak Najib Kailani, Bapak Ibnu Burdah, Bapak Munirul Ikhwan, Bapak Muhammad Yunus Masruhin, Bapak Ahmad Muttaqin, Bapak Abdul Mustaqim, Bapak Roma Ulinnuha, Ibu Nina Mariani Noor, Ibu Euis Nurlaelawati, Ibu Ro'fah, Ibu Amina Wadud, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di kelas PMLD: Abu Sufyan, M. Naufal Waliyuddin, Mustaqim, Achmad Rifai, Ikhwanul Fuad Ahsan, Amamur Rohman Hamdani, Fadhli, Annisa Fitri Amaliah, Ulfa Ramadhani Nasution, Syarifah Isnaini, Alfi Syahriyati, Rezki Putri Nur A., Noorhidayah, Alfi Kamaliah, Afrida Arinal Muna, Yusti Dwi Noorwendah, Moona Maghfirah, Aisyah. Kalian telah banyak memberi motivasi pada saya untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan akademik saya.

Tentu saja, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Salafi yang rela meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagai informasi kepada saya. Tanpa bantuan mereka, mungkin tesis ini hanya akan selesai dalam waktu yang lebih lama atau mungkin tidak sama sekali. Kepada semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebut di sini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Terakhir dan paling utama, saya berterima kasih kepada keluarga saya: almarhum Bapak saya, Rohadi, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan ikhlas dan sabar namun belum sempat saya banggakan; Ibu saya, Rofiqoh, yang rela mengurus air mata dalam setiap doanya demi anak-anaknya. Persembahan melalui karya ini rasanya belum cukup untuk sekedar menjadi imbalannya.

Akhir kata, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat atas segala kekecewaan akibat kesalahan, waktu yang terbuang, dan kerugian lain karena penyelesaian studi ini. Meski banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Saya sangat mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca agar studi ini dapat benar-benar berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik.

Yogyakarta, 21 Agustus 2021

Penulis

Muhammad Mufti Al Achsan, S.Ag.

NIM: 19200013010

MOTTO

“Masked, I advance.” Rene Descartes



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada almarhum Ayah saya, Rohadi, yang belum sempat saya banggakan; kepada Ibu saya, Rofiqoh, yang rela menguras air mata dalam setiap doa dan perjuangan demi anak-anaknya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN MOTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Metode dan Sistematika	7
BAB II: PEMBAHASAN	11
A. Salafisme dan Sikap Politik Salafi	11
B. Doktrin Ketaatan kepada Pemimpin	16
C. Islam Politik Salafi	21
1. Pemerintahan Islam seperti apa?	21
2. Partisipasi dalam Pemilu	26
D. Salafi di Masa Pandemi: dinamika aktualisasi doktrin ketaatan kepada pemerintah	39
1. Respons Salafi terhadap Kebijakan Peribadatan di Masa Pandemi: mematuhi pemerintah atau sebaliknya	39
2. Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid	54
3. Penerapan Protokol Kesehatan di Pesantren	64

a. Perubahan Respons terhadap Pandemi: kasus pesantren Menara Al-Qur'an.....	64
b. Islamic Center Bin Baz dan Konsistensi Penerapan Protokol Kesehatan	67
4. Vaksinasi Covid-19 di Kalangan Salafi	72
a. Legitimasi MUI dan Otoritas Salafi	72
b. Penolakan terhadap Vaksin	78
BAB III: KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini mengkaji respons Salafi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Studi ini berfokus pada Salafi *purist*,¹ yang dikenal memegang teguh doktrin ketaatan kepada pemerintah sekaligus bersikap apolitis.² Dengan melakukan observasi di dua pesantren dan beberapa masjid Salafi, studi ini mencoba melihat bagaimana sikap yang mereka ambil dalam menanggapi kebijakan yang ada.

Secara umum, respons Salafi terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan kesan positif. Mereka berusaha menerapkan doktrin ketaatan kepada pemimpin di masa pandemi ini. Usamah Faishal Mahri, salah satu tokoh Salafi menyebut bahwa kehadiran pandemi Covid-19 merupakan ujian sekaligus pembuktian bagi mereka apakah doktrin yang selama ini mereka yakini benar-benar diterapkan.³ Dzulqarnain, tokoh Salafi Makassar menyebut bahwa pelarangan mudik di hari raya idulfitri yang ditetapkan pemerintah wajib untuk dipatuhi.⁴ Menerima tamu saat hari raya idulfitri dipandang

¹ Mengenai kelompok Salafi *purist* akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian pembahasan.

² Lihat Quintan Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement," *Studies in Conflict & Terrorism* 29, no. 3 (May 2006): 207–239; Joas Wagemakers, "Revisiting Wiktorowicz: Categorising and Defining the Branches of Salafism", dalam *Salafism after the Arab Awakening: Contending with People's Power*, ed. oleh Francesco Cavatorta and Fabio Merone (London: Hurst, 2016).

³ <https://www.youtube.com/watch?v=uh2Z8bJ1Pfg>, 13 Mei 2021.

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=fCWsGxObJcM>, 8 Agustus 2021.

sebagai ketidaktaatan kepada pemerintah.⁵ Di samping itu, menurutnya orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan di masjid di masa pandemi termasuk telah berbuat dosa dan harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan.⁶

Beberapa sarjana telah melakukan kajian baik tentang respons Muslim ataupun masyarakat Indonesia secara luas terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Dalam kajian yang dilakukan oleh Saiful Mujani,⁷ respons masyarakat secara umum atas kebijakan pemerintah dalam menangani wabah cenderung positif namun terdapat variasi yang signifikan, yakni terdapat penilaian yang sangat negatif maupun sebaliknya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi variasi tersebut: pertama faktor penilaian kondisi ekonomi nasional, bahwa semakin bagus penilaian terhadap kondisi perekonomian negara maka semakin bagus pula penilaiannya terhadap kinerja pemerintah pusat. Kedua, faktor pilihan presiden pada pemilu 2019; masyarakat yang waktu itu memilih Jokowi ketimbang pesaingnya Prabowo cenderung memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah. Ketiga, faktor afiliasi partai politik; masyarakat yang mendukung partai politik koalisi pemerintah saat ini (PDIP, Gerindra, Partai Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PSI, atau PBB) memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah menangani pandemi.

Selain ketiga faktor di atas, Mujani juga menunjukkan bahwa faktor identitas keagamaan berpengaruh terhadap penilaian atas kinerja pemerintah.

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=tjl-Y-MZ1Fg>, 8 Agustus 2021.

⁶ https://www.youtube.com/watch?v=Pj5MmaNYD_g, 8 Agustus 2021.

⁷ Saiful Mujani, "Asesmen Publik atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik," *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (2020): 159–172.

Masyarakat dengan identitas keagamaan Islam cenderung menilai negatif kinerja pemerintah ketimbang yang non-Islam. Klaim tersebut diperkuat dalam studinya yang lain,⁸ bahwa dalam praktiknya masyarakat yang beragama Islam cenderung menolak untuk patuh terhadap kebijakan pembatasan sosial, baik dalam aspek kegiatan keagamaan maupun yang lainnya. Adanya kebijakan pembatasan sosial ini dipandang menghalangi Muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, terutama salat lima waktu berjemaah. Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah juga menghalangi mereka untuk merayakan hari raya Idulfitri karena dikhawatirkan memicu kerumunan masa.

Menurut Mujani,⁹ penilaian negatif kinerja pemerintah dan ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan pandemi berkaitan dengan polarisasi agama dalam pilihan presiden dan afiliasi partai politik yang muncul di masa pemilu 2019. Pendukung Jokowi dan partai koalisinya diisi oleh mayoritas non-Muslim, sedangkan pendukung Prabowo beserta koalisinya adalah mayoritas Muslim, terutama dari kalangan konservatif.¹⁰ Kalangan Muslim ini cenderung tidak patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Karenanya, pesan kesehatan terkait pencegahan Covid-19 kurang

⁸ Saiful Mujani, "Sikap dan Perilaku Warga Terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19," *Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2020): 228–229.

⁹ Mujani, "Asesmen Publik atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik," 170.

¹⁰ Penjelasan lebih lanjut mengenai polarisasi agama dalam pilihan Presiden 2019 bisa dilihat dalam Thomas B. Pepinsky, 'Islam and Indonesia's 2019 Presidential Election', https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/ap14-4_indonesiart_oct2019.pdf, 6 Juni 2021; Eve Warburton "How polarised is Indonesia and why does it matter?" dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*, ed. oleh Thomas Power and Eve Warburton (Singapore: ISEAS, 2020), 63-80.

efektif di kalangan mereka, dan lebih efektif di kalangan pendukung presiden yang menjabat.¹¹

Meski pasca pemilu usai Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi, namun polarisasi masih tetap berlanjut, bahkan menurut Marcus Mietzner semakin meningkat.¹² Kelompok Islamis konservatif beralih posisi menjadi pendukung Anies Baswedan, gubernur Jakarta. Anies dipilih sebab ia adalah salah satu tokoh yang berperan dalam Aksi 212, sebuah aksi demonstrasi merespons kasus penistaan agama oleh Ahok. Di samping itu, Anies juga menjadi tokoh harapan para Islamis untuk pemilu presiden tahun 2024. Menurut Mietzner, polarisasi ini berdampak pada bagaimana Jokowi dan Anies menangani pandemi, yakni keduanya tampak menetapkan kebijakan yang berlawanan. Di masa awal pandemi, Jokowi mengambil langkah yang tidak terlalu ketat dengan pertimbangan agar ekonomi tetap berjalan. Ia berpegang pada jumlah kasus terinfeksi covid-19 yang dipandang tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, Anies cenderung lebih ketat dalam menetapkan kebijakannya. Ia memandang bahwa jumlah kasus positif tinggi sehingga menetapkan kebijakan *lockdown* bagi wilayah Jakarta, di samping menutup akses jalur transportasi ke luar kota. Sikap dan kebijakan yang diambil Anies sangat didukung oleh kelompok Islamis konservatif. Rizieq Shihab misalnya, pemimpin Aksi 212 ini menekankan bahwa umat Islam harus menjauh dari

¹¹ Nicholas Kuipers, Saiful Mujani, and Thomas Pepinsky, "Encouraging Indonesians to Pray From Home During the COVID-19 Pandemic," *Journal of Experimental Political Science* (2020): 1–12.

¹² Marcus Mietzner, "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 227–249.

masjid selama wabah karena kalau tidak mereka akan disalahkan lantaran dianggap telah menyebarkan virus. Senada dengan Rizieq, dai terkemuka, Abdul Somad, menyampaikan khotbah dengan mengemukakan pembenaran teologis agar masyarakat tetap tinggal di rumah.

Kendati demikian, studi yang dilakukan Mujani maupun Mietzner di atas belum seutuhnya merepresentasikan sikap umat Islam di Indonesia terhadap penanganan Covid-19. Belum ada penjelasan yang tegas tentang bagaimana segmentasi Muslim konservatif yang cenderung menilai negatif dan menentang kebijakan pemerintah. Kelompok Salafi sebagai salah satu gerakan Islam konservatif¹³ di Indonesia belum mendapat perhatian dari keduanya. Yang paling jelas dalam hal ini adalah kelompok Islam yang terafiliasi dengan PKS dan PAN, di samping organisasi Islam lain seperti HTI dan FPI, yang dalam pemilu 2014 maupun 2019 memosisikan diri sebagai oposisi presiden beserta partai koalisinya.¹⁴ Walaupun Salafi ikut terlibat dalam arus polarisasi tersebut dan berujung pada respons negatif terhadap kebijakan pemerintah, ini tentu bertentangan dengan doktrin ketaatan kepada pemerintah yang selama ini mereka pegang. Di samping itu, sejauh ini para

¹³ Muslim konservatif yang dimaksud adalah kelompok Islam yang menolak penafsiran ulang ajaran Islam yang lebih progresif, liberal, dan modern, dengan tetap mempertahankan doktrin keagamaan yang telah mapan. Lihat *Contemporary Developments in Indonesian Islam; Explaining the "Conservative Turn"* ed. Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam; Explaining the "Conservative Turn"* (Singapore: ISEAS, 2013).

¹⁴ Alexander Arifianto 'What the 2019 Election Says about Indonesian Democracy', https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/ap14-4_indonesiart_oct2019.pdf, 6 Juni 2021

sarjana menyebut bahwa Salafi cenderung bersikap apolitis, menolak partisipasi dalam demokrasi¹⁵ dan menghindar dari hiruk pikuk perpolitikan.

Studi ini berpendapat bahwa meski Salafi ikut larut dalam polarisasi agama di masa pemilu, hal itu tidak menjadi landasan penentu sikap mereka dalam merespons kebijakan pemerintah di masa pandemi. Beberapa aspek seperti prinsip ketaatan pada pemerintah, kekhawatiran akan bahaya Covid-19, ketundukan pada tekstualitas dalil, dan konteks sosio-politik yang ada menjadi pertimbangan Salafi dalam mengambil sikap atas kebijakan dan imbauan pemerintah. Paradoksnya, dalam praktiknya bukan lantaran doktrin ketaatan maupun aspek lainnya tersebut yang menjadikan mereka patuh pada kebijakan dan imbauan. Dalam kasus masjid dan pesantren, sikap para tokoh Salafi atas kebijakan yang ada cenderung lebih menentukan bagaimana para jemaah kemudian ikut bersikap dan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, keputusan jemaah Salafi untuk menerima vaksin dilandasi oleh legitimasi MUI dan pengaruh para tokoh Salafi yang berprofesi sebagai dokter.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang dapat diajukan di antaranya:

1. Bagaimana Salafi merespons kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19?
2. Apakah respons tersebut berkaitan dengan polarisasi agama di masa pemilu?

¹⁵ Din Wahid, "The Challenge of Democracy in Indonesia: The Case of Salafi Movement," *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (April 19, 2014): 51.

3. Sejauh mana doktrin ketaatan kepada pemerintah menentukan respons tersebut?

C. Metode dan Sistematika

Studi ini dilakukan sejak Mei hingga Juli 2021, dengan mengambil data dari sumber *online* dan *offline*. Dalam mengumpulkan data saya berfokus pada Salafi *purist*. Terkait sumber primer *online* saya memperoleh data melalui media sosial Youtube, Telegram, Instagram dan beberapa web. Dari Youtube saya mendengarkan ceramah para tokoh Salafi melalui beberapa kanal di antaranya: Rodja TV, Yufid.TV, Rumaysho TV, Muslim.Or.Id, dan kanal Firanda Andirja. Adapun sumber data web saya peroleh dari muslim.or.id, rumaysho.com, dan dewanfatwa.com.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana Salafi menerapkan kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 saya melakukan observasi lapangan di beberapa masjid dan dua pesantren. Pemilihan masjid dan pesantren terbagi menjadi dua katagori: wilayah perkotaan dan pedesaan. Pertimbangan ini untuk melihat apakah kondisi masyarakat dan jumlah kasus yang terpapar Covid-19 dengan dua katagori wilayah tersebut mempengaruhi kebijakan dari masing-masing objek observasi. Observasi yang saya lakukan berlangsung selama satu bulan, yakni sebagian besar di bulan Juni dan sisanya di bulan Agustus. Selama itu saya beberapa kali mengikuti salat berjemaah di beberapa masjid Salafi, tiga masjid berlokasi di wilayah Sleman, dan satu masjid di wilayah Yogyakarta. Di wilayah Yogyakarta saya mendatangi masjid Al-Hasanah, tepatnya berlokasi di Jl. C. Simanjuntak No. 76, Terban. Sedangkan

untuk wilayah Sleman di antaranya: masjid Al-Ikhlas yang terletak di Jl. Karangbendo Kulon, Caturtunggal; masjid Pogung Raya yang terletak di Jl. Pogung Dalangan, Mlati; dan masjid Al-Anshar di Jl. Wonosalam, Ngaglik. Dari keempat masjid, tiga masjid (Al-Hasanah, Al-Ikhlas, dan Pogung Raya) terletak di tengah kota dan satu masjid (Al-Anshar) di pedesaan. Adapun untuk pesantren, saya mendatangi pondok pesantren Menara Al-Qur'an yang berlokasi di daerah pedesaan di kabupaten Temanggung. Sebagai pembanding saya memilih pesantren yang berlokasi di daerah perkotaan Yogyakarta, yakni Islamic Center Bin Baz. Pada mulanya saya bermaksud untuk observasi langsung ke pesantren yang disebut terakhir ini, tetapi karena pandemi, akses untuk masuk bagi orang luar agak dipersulit. Di samping itu, menurut informan yang saya temui, waktu itu terdapat salah satu pengajarnya yang terkena Covid-19, sehingga orang luar Bin Baz sama sekali dilarang masuk. Akhirnya saya hanya menggali informasi melalui informan tersebut tanpa melihat langsung ke pesantren dengan menemuinya di luar pesantren. Kendati demikian, saya masih bisa mengamati aktifitas pesantren—meski secara terbatas—melalui kanal Youtube *official* Bin Baz.

Untuk menggali data lebih dalam, setelah selesai melakukan observasi saya kemudian mewawancarai beberapa informan. Karena sebagian informan meminta agar namanya disamarkan, atau karena saya belum sempat menanyakan terkait kebolehan menyebut nama asli mereka, maka tidak semua informan dalam studi ini menggunakan nama yang sebenarnya. Yang jelas mereka telah mengizinkan hasil wawancaranya untuk ditulis dalam studi ini.

Di masjid Pogung Raya saya menemui Ardi yang merupakan salah satu takmir masjid. Selain itu saya juga menemui Septian, salah satu jemaah masjid tersebut. Dari lingkaran pesantren saya menemui Andika, salah satu staf di pesantren Bin Baz. Alwi dan Latif, dua orang pengajar di pesantren Menara Al-Qur'an. Selain itu, saya juga mewawancarai informan dari luar lingkaran masjid dan pesantren melalui media sosial Whatsapp, di antaranya Zain, dan Husna. Keduanya adalah jemaah Salafi yang aktif mengikuti ceramah para dai Salafi Rodja melalui media sosial.

Selanjutnya studi ini akan mengulas beberapa pembahasan. Bagian pertama memaparkan pengertian Salafisme dan sikap politiknya. Di bagian ini akan mendiskusikan Salafi *purist* beserta variannya. Bagian kedua menjelaskan tentang doktrin ketaatan kepada pemerintah. Di bagian ini dijelaskan dasar Islam yang digunakan Salafi dalam membentuk doktrin tersebut, bagaimana doktrin tersebut berkembang dan bagaimana Salafi memberikan interpretasi yang berbeda terhadap landasan tekstualnya. Bagian ketiga mengulas tentang Islamisme Salafi. Di bagian ini akan dijelaskan bagaimana pandangan Salafi tentang pemerintahan Islam dan bagaimana hal itu mendasari sikap mereka terhadap pemilu. Di bagian ini juga dijelaskan konteks sosio-politik Indonesia di masa pemilu yang melatarbelakangi Salafi larut dalam polarisasi. Bagian ke empat berisi respons Salafi terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi yang meliputi respons mereka terhadap kebijakan ibadah di masa pandemi, bagaimana penerapan

protokol kesehatan di masjid dan pesantren, serta respons mereka terhadap kebijakan vaksinasi.



BAB III

KESIMPULAN

Studi ini telah memaparkan bagaimana respons Salafi terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Berangkat dari studi sebelumnya yang belum sepenuhnya merepresentasikan bagaimana respons Muslim konservatif terhadap penanganan pandemi, studi ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan berfokus pada gerakan Salafi *purist*, sebagai salah satu varian Muslim konservatif. Berbeda dengan narasi yang ada dari studi sebelumnya, studi ini berpendapat bahwa polarisasi agama di masa pemilu bukan menjadi landasan penentu sikap yang diambil Salafi dalam merespons kebijakan pemerintah.

Narasi tentang calon presiden yang dipandang sebagai pendukung Islam melawan calon anti-Islam memaksa Salafi ikut larut dalam arus polarisasi agama di masa pemilu. Kekhawatiran bahwa pemerintahan Indonesia akan diisi oleh kelompok anti-Islam yang membahayakan masa depan umat Islam menjadikan Salafi bukan hanya menjadi pendukung calon presiden beserta partai Islamis yang menyertainya, tetapi juga membawa mereka ikut berpartisipasi memberikan suara saat pemilu. Di samping itu, polarisasi ini juga bisa dipahami sebab adanya harapan di kalangan Salafi bahwa Indonesia yang mereka tinggali saat ini bisa menjadi negara yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Dengan ikut serta di pemilu, paling tidak usaha untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilakukan.

Ini jelas menunjukkan bahwa Salafi bukan sama sekali bersikap apolitis sebagaimana diklaim oleh sebagian sarjana.

Kendati Salafi larut dalam polarisasi agama di masa pemilu, hal itu bukan menjadi landasan yang menentukan bagaimana mereka menyikapi kebijakan dan imbauan pemerintah di masa pandemi. Terdapat beragam aspek yang mendasari sikap yang diambil Salafi. Prinsip ketaatan pada pemimpin menjadikan sebagian Salafi berusaha patuh terhadap imbauan dan kebijakan pemerintah. Ini tampak pada tokoh-tokoh mantan anggota Laskar Jihad, misalnya yang jelas terlihat dalam sikap Dzulqarnain dan juga sebagian Salafi Madkhali lain. Kekhawatiran akan bahaya Covid-19 juga menjadi pertimbangan sebagian Salafi dalam menyikapi kebijakan yang ada, yang terkadang memaksa mereka untuk menyuarakan kritiknya atas ketidaktegasan pemerintah. Ini direpresentasikan oleh Salafi jaringan Abu Nida. Selain itu, ketundukan pada tekstualitas dalil dan pertimbangan konteks sosio-politik yang ada membawa Salafi pada sikap yang ambigu. Di satu sisi mereka menyuarakan ketaatan kepada pemerintah namun di sisi lain mereka menolak imbauan pemerintah dengan dasar adanya pertentangan dengan doktrin keagamaan yang mereka yakini. Ini terlihat pada Salafi Rodja yang direpresetasikan dengan sikap Yazid Abdul Qadir Jawas.

Paradoksnya, dalam hal kebijakan dan penerapan protokol kesehatan di masjid dan pesantren serta kasus vaksinasi, bukan doktrin ketaatan kepada pemerintah maupun aspek lain yang disebut di atas yang menjadi landasan utama Salafi dalam bersikap. Praktik penerapan protokol kesehatan lebih ditentukan oleh masing-masing aktor yang berperan di dalamnya. Masjid Pogung Raya (MPR)

yang terlihat ketat dimoroti oleh salah satu tokoh Salafi yang berprofesi sebagai dokter. Hal ini berbeda dengan dua masjid lain, Al-Hasanah dan Al-Ikhlas, yang sama-sama berlokasi di pusat kota. Keduanya tampak tidak terlalu ketat dalam membuat kebijakan terkait protokol kesehatan. Di samping itu, dalam kasus Al-Anshar, kuatnya narasi ketaatan kepada pemerintah di kalangan Salafi Madkhali membuat masjid yang berlokasi agak jauh dari pusat kota ini tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, walau tidak seketat MPR. Di pesantren Menara Al-Qur'an, perubahan pandangan dari pimpinan pesantren menjadi penentu perubahan sikap yang diambil para penghuni pesantren dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan model yang sama, pesantren Islamic Center Bin Baz yang tetap konsisten dengan penerapan protokol kesehatan juga dilatarbelakangi oleh kepatuhan penghuni pesantren dengan pimpinannya, Abu Nida. Dalam kasus vaksinasi, MUI dan para tokoh Salafi yang berperan sebagai dokter menjadi pertimbangan yang legitimatif terkait kemauan mereka untuk divaksin. Kendati demikian, narasi publik tentang resiko kesehatan akibat vaksinasi, teori konspirasi dan soal kehalalan vaksin, memaksa sebagian Salafi untuk bernegosiasi, bahkan mengambil sikap yang ambivalen dengan doktrin ketaatan kepada pemerintah yang mereka yakini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Disertasi, Artikel

- Ayubi, Nazih. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge, 1991.
- Bruinessen, ed. Martin van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam; Explaining the "Conservative Turn."* Singapore: ISEAS, 2013.
- Cavatorta, ed. Francesco, and Fabio Merone. *Salafism after the Arab Awakening: Contending with People's Power*. London: Hurst, 2016.
- Fianto, ed. Farinia, and Fahmi Syharul Alim. *Fatwa Dan Pandemi Covid-19: Diskusi, Teori, Dan Praktik*. Banten: ICIP, 2021.
- Hasan, Noorhaidi. *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, Dan Teori*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- . *Laskar Jihad: Islam, Militansi, Dan Pencarian Identitas Di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Kuipers, Nicholas, Saiful Mujani, and Thomas Pepinsky. "Encouraging Indonesians to Pray From Home During the COVID-19 Pandemic." *Journal of Experimental Political Science* (2020): 1–12.
- Manzur, Ibn. *Lisān al-'Arāb*. Beirut: Dār al-Ma'ārif, tt.
- Mietzner, Marcus. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (August 2020): 227–249.
- . "Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and Technocrats." *Australian Journal of International Affairs* 74, no. 4 (July 3, 2020): 420–438.
- Mujani, Saiful. "Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid-19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik." *Jurnal Penelitian Politik* 17, no. 2 (December 2020): 159–172.
- . "Sikap Dan Perilaku Warga Terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2020): 219–238.
- Pall, Zoltan. *Lebanese Salafis between the Gulf and Europe: Development, Fractionalization and Transnational Networks of Salafism in Lebanon*. Forum Publications. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.

Sunarwoto. "Negotiating Salafi Islam and the State: The Madkhaliyya in Indonesia." *Die Welt des Islams* 60, no. 2–3 (May 27, 2020): 205–234.

———. "Online Salafi Rivalries in Indonesia: Between Sectarianism and 'Good' Citizenship." *Religion, State and Society* 49, no. 2 (March 15, 2021): 157–173.

Wahid, Din. "Nurturing The Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia." PhD Dissertation, Utrecht University, 2014.

———. "The Challenge of Democracy in Indonesia: The Case of Salafi Movement." *Islamika Indonesiana* 1, no. 1 (April 19, 2014): 51.

Wiktorowicz, Quintan. "Anatomy of the Salafi Movement." *Studies in Conflict & Terrorism* 29, no. 3 (May 2006): 207–239.

Internet

Addariny, Musyaffa. 'Kaidah yang lagi Viral "Mengambil yang lebih Ringan Muharatnya"' www.muslim.or.id. 18 Juli 2021.

Anshori, Ahmad. 'Indonesia bukan Negara Islam?' www.muslim.or.id. 30 Juni 2021.

Antara, 'Vaksin AstraZeneca Halal atau Haram? Dosen ITB Beberkan Cara Produksinya.' www.tekno.tempo.co. 7 Mei 2021.

Bahraen, Raehanul. 'Pro Kontra Hukum Vaksinasi.' www.muslim.or.id. 27 Juli 2021.

Grover, Natalie. 'PCR, antigen and antibody: Five things to know about coronavirus tests.' www.ec.europa.eu. 8 Agustus 2021.

Hakim, M. Saifudin. 'Hukum Vaksinasi Polio (1): Prosesnya Bersinggungan Dengan Bahan Dari Babi?.' www.muslim.or.id. 20 Juli 2021.

———. 'Mall dan Pasar Dibuka, Mengapa Masjid Ditutup?,' www.muslim.or.id. 20 Juli 2021.

———. 'Menjadi Muslim Sejati dengan Menolak Vaksinasi?.' www.muslim.or.id. 27 Juli 2021.

———. 'Varian Delta, Bagaimana Kita Bersikap?.' www.muslim.or.id. 20 Juli 2021.

Jawwas, Yazid Abdul Qadir. 'Di Rumah Saja (Stay Home) Covid-19 Pandemic.' www.almanhaj.or.id. 30 Juli 2021.

- Kamaliah, Aisyah. 'Vaksin tanpa Babi, Mungkinkah? Begini Sikap Koalisi Dokter Muslim.' www.health.detik.com. 7 Mei 2021.
- Munandar, Aris. 'Soal-45: Apakah Presiden Termasuk Ulil Amri?' www.muslim.or.id. 20 Juli 2021.
- Pranita, Ellyvon. 'Penyebab dan Gejala Sindrom Guillain Barre, Penyakit Lumpuh Guru Susan Usai Vaksinasi.' www.kompas.com. 28 Juli 2021.
- SMRC. 'Mayoritas Warga Setuju Pemerintah Tetapkan Normal Baru.' www.saifulmujani.com. 29 Juli 2021.
- . 'Hanya Sekitar 46% Warga yang Bersedia Divaksinasi Covid-19.' www.saifulmujani.com. 27 Juli 2021.
- . 'Efek Tokoh dan Otoritas Kesehatan pada Intensi Warga untuk Divaksinasi: Survei Eksperimental.' www.saifulmujani.com. 27 Juli 2021.
- . 'Satu Tahun Covid-19: Sikap dan Perilaku Warga terhadap Vaksin.' www.saifulmujani.com. 27 Juli 2021.
- Tawakal, Cesar Uji. 'Pakai Vaksin Astrazeneca, Pria 57 Tahun Ini Alami Lumpuh Kaki.' www.suara.com. 28 Juli 2021.
- Teguh, Irfan. 'Kisah Kemenangan Prabowo di TPS Pusat Dakwah Salafi Radio Rodja.' www.tirto.id. 01 Juli 2021.
- . 'Situasi Terkini Pemilu 2019 di Pusat Dakwah Salafi Radio Rodja.' www.tirto.id. 01 Juli 2021.
- Tuasikal, M. Abduh. 'Uzur tidak Menghadiri Shalat Berjamaah di Masjid.' www.rumaysho.com. 11 Maret 2021.
- . 'Hormati Keputusan Para Dokter di Masa Pandemi.' www.rumaysho.com. 30 Juli 2021.
- Ukkasyah, Sa'id Abu. 'Benarkah Khilafah Islamiyyah adalah Tujuan? (2).' www.muslim.or.id. 30 Juni 2021.
- . 'Benarkah Khilafah Islamiyyah adalah Tujuan? (3).' www.muslim.or.id. 30 Juni 2021.
- Umri, Mahfuzh. 'Tanggapan Untuk Saudara Arifin Badri Tentang Penutupan Masjid.' www.aslibumiayu.net. 18 Agustus 2021.

Yusuf, Abu Hamzah. 'Mengenal Waliyyul Amr.' www.asysyariah.com. 6 Mei 2021.

———. 'Menghormati Pemerintah sebagai Waliyyul Amr.' www.asysyariah.com. 6 Mei 2021.

Yusuf, Abu Ubaidah. 'Kontroversi Hukum Imunisasi Polio.' www.almanhaj.or.id. 27 Juli 2021.

www.youtube.com



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Mufti Al Achsan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl. Lahir : Temanggung, 30 Juni 1994

Alamat Asal : Balun, RT 07/RW 02, Kandangan, Temanggung

Alamat Tinggal : Muja Muju RT 43/RW 12, Umbulharjo,
Yogyakarta

Email : facelessmansecret@gmail.com

No. HP : 089616103587



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

1. SDN Ngemplak 2, lulus tahun 2006
2. MTs N Kedu, lulus tahun 2009
3. MAN Temanggung, lulus tahun 2012
4. UIN Sunan Kalijaga, lulus tahun 2017

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Tahfiz di SD Al-Azhar Cairo Yogyakarta

Yogyakarta, 21 Agustus 2021

Muhammad Mufti Al Achsan